

Transformasi Fungsi dan Peran Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi Tahun 1973-2025

Gusventio Zulmarta^{1*}, Etmi Hardi²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^{*}gusventiozulmarta@gmail.com

ABSTRACT

Museums function not only as institutions for preserving cultural heritage but also as spaces for shaping collective memory, providing public education, and representing historical narratives. Political changes in Indonesia have significantly influenced the functions and roles of museums, including the Tridaya Eka Dharma Struggle Museum in Bukittinggi, which was established during the New Order era. This study aims to analyze the transformation of the functions and roles of the Tridaya Eka Dharma Struggle Museum from an instrument of political legitimacy to a historical tourism destination during the period of 1973-2024. This research employed the historical method with a qualitative approach, consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through archival research, official documents, field observations, interviews, and relevant scholarly literature. The findings reveal that during the period of 1973-1998, the museum functioned as an instrument of political legitimacy by reinforcing the state's official historical narrative concerning the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) and the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) through the presentation of collections and historical interpretations aligned with New Order policies. During the Reform Era (1999-2010), the museum experienced a paradigm shift from a collection-centered institution to a people-centered institution, leading to the expansion of its educational function in response to democratization and increasing public demand for historical openness. Furthermore, in the period of 2011-2025, the museum strengthened its role as a center for public history education and historical tourism through educational programs, promotional activities, and the gradual adoption of digital media, although challenges remain in terms of funding, human resources, and the digitalization of museum collections. This study concludes that the transformation of the Tridaya Eka Dharma Struggle Museum has been shaped by changes in political regimes, museum policies, and evolving societal needs. These findings demonstrate that the museum has evolved from serving primarily as an instrument of political legitimacy into a public institution that contributes to the preservation of collective memory, history education, and the development of cultural and historical tourism.

Keywords: *Museum, Struggle, Tridaya Eka Dharma, legitimacy, Tourism.*

ABSTRAK

Museum merupakan institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelestarian warisan budaya, tetapi juga sebagai ruang pembentukan memori kolektif, pendidikan, dan representasi sejarah. Perubahan politik di Indonesia telah memengaruhi fungsi dan peran museum, termasuk Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi yang didirikan pada masa Orde Baru. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi fungsi dan peran Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma dari alat legitimasi politik menuju pariwisata sejarah pada periode 1973-2024. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan

pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari arsip, dokumen, observasi, wawancara, serta berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1973-1998 museum berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik yang mendukung narasi resmi negara mengenai perjuangan nasional, khususnya PDRI dan PRRI, melalui penyajian koleksi dan interpretasi sejarah yang selaras dengan kebijakan Orde Baru. Memasuki era Reformasi (1999-2010), terjadi perubahan paradigma pengelolaan museum dari institusi yang berorientasi pada koleksi menuju institusi yang berorientasi pada masyarakat, sehingga fungsi edukasi mulai berkembang sebagai respons terhadap tuntutan demokratisasi dan keterbukaan informasi. Selanjutnya, pada periode 2011-2025 museum mengalami penguatan fungsi sebagai sarana edukasi publik dan bagian dari pengembangan pariwisata sejarah melalui peningkatan kegiatan pembelajaran, promosi, dan pemanfaatan media digital, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan digitalisasi koleksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma dipengaruhi oleh perubahan rezim politik, kebijakan permuseuman, serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa museum tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang legitimasi politik, tetapi telah berkembang menjadi institusi publik yang berperan dalam pelestarian memori kolektif, pendidikan sejarah, dan pengembangan pariwisata budaya.

Kata Kunci: Museum, Perjuangan, Tridaya Eka Dharma, legitimasi, pariwisata.

PENDAHULUAN

Museum merupakan lembaga permanen yang terbuka untuk umum dan berfungsi sebagai tempat mengumpulkan, menyimpan, melestarikan, meneliti, serta memamerkan berbagai warisan budaya dan benda bersejarah (Mufidah, 2019). Museum berperan dalam mengembangkan dan mengomunikasikan koleksi kepada masyarakat untuk tujuan penjaga memori kolektif melalui pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi (Jaman et al., 2026). Selain itu, museum juga memiliki peran dalam membentuk identitas nasional yang direpresentasikan melalui setiap koleksi yang dipamerkan, bahwa Indonesia memiliki sejarah luar biasa pada masa lalu yang dapat dilihat sampai hari ini (Rooseline & Yudiswara, 2025).

Peran-peran yang dijelaskan di atas sesuai dengan peranan museum di Indonesia dalam membentuk memori kolektif dan identitas nasional. Konteks tersebut terlihat jelas pada masa Orde Baru (1966-1998), ketika pendirian museum perjuangan di berbagai daerah dijadikan sebagai bagian dari upaya legitimasi politik untuk memperkuat narasi tunggal sejarah nasional. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sejarah TNI banyak membangun museum bertema kepahlawanan dan perjuangan bangsa. Sejarah yang ditampilkan disusun secara terpusat dan menegaskan pemerintah sebagai penerus sah perjuangan kemerdekaan. Pemerintah Orde Baru memanfaatkan sejarah sebagai alat kontrol ideologis untuk membentuk kesadaran nasional yang seragam.

Salah satu museum yang pada awal pendiriannya menjadi bagian dari upaya legitimasi politik pemerintah Orde Baru adalah Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma

di Bukittinggi, Sumatra Barat. Museum ini menyimpan berbagai koleksi senjata milik anggota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), serta koleksi militer lainnya. Sebelum dijadikan museum, bangunan tersebut merupakan kediaman Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatra Tengah pada masanya, yang menyimpan berbagai peninggalan PDRI (1948-1949) dan PRRI (1958). Bangunan ini kemudian diresmikan sebagai museum pada 16 Agustus 1973 oleh Mohammad Hatta. Nama *Tridaya* berasal dari falsafah Minangkabau yaitu *Tigo Tungku Sajarangan* yang bermakna tiga unsur kekuatan, sebagai simbol semangat pengabdian dan persatuan dalam perjuangan (Rahma & Suriani, 2023).

Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi dipilih menjadi objek kajian penelitian disebabkan dalam rentang tahun 1973 sampai 2025, museum ini mengalami perubahan atau transformasi baik dari segi fungsi dan peran pada masa Orde Baru hingga Reformasi. Pada masa Orde Baru (1973-1998) museum ini memiliki fungsi dan peran sebagai alat legitimasi politik kepada masyarakat untuk menonjolkan peran militer (TNI) dalam menjaga keutuhan negara. Namun, setelah Reformasi (1999-2025) museum difungsikan sebagai tempat sarana edukasi publik melalui pengembangan pariwisata sejarah di Kota Bukittinggi. Tidak hanya itu, saat ini fungsi museum kemudian diperluas sebagai ruang pembelajaran kontekstual yang menakankan nilai-nilai perjuangan PDRI dan PRRI, sekaligus membuka ruang interpretasi sejarah yang lebih kritis untuk masyarakat. Tahun 2025, museum akan di transformasikan secara digital. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Hooper-Greenhill bahwa museum harus bergerak dari paradigma *Museum as Temple to Museum as Forum*, yaitu ruang dialog antara masa lalu dan masa kini yang mengundang partisipasi publik (Greenhill, 2000). Penelitian mengenai Museum Tridaya Eka Dharma sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. (Jaman et al., 2026) menekankan museum sebagai media pembelajaran sejarah berbasis koleksi, sedangkan (Rahma & Suriani (2023) mengkaji peran museum dalam meningkatkan literasi sejarah masyarakat. Penelitian lain lebih banyak membahas strategi penyajian koleksi maupun pengelolaan museum sebagai media edukasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan secara historis bagaimana perubahan fungsi Museum Tridaya Eka Dharma berlangsung sejak awal pendiriannya pada masa Orde Baru hingga berkembang menjadi bagian dari pariwisata sejarah setelah era Reformasi. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan perubahan tersebut dengan dinamika kebijakan permuseuman nasional, perubahan politik, serta perkembangan konsep museum modern

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan utama yang menjadi fokus penulis dalam artikel ini adalah bagaimana proses transformasi yang dilalui Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi 1973-2025, khususnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan fungsi dan perannya berbeda dari masa Orde Baru hingga masa kontemporer saat ini dalam kurun waktu lebih dari lima dekade.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, 2007). Keempat tahap ini digunakan sejarawan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sempurna dari permasalahan awal yang ditemukan. *Pertama* yang dilakukan yaitu heuristik. Peneliti melakukan heuristik dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber mengenai fungsi dan peran Museum Tridaya Eka Dharma Bukittinggi sebagai museum persenjataan PDRI dalam rentang waktu 1970 sampai 2025. Sumber yang dikumpulkan peneliti berupa arsip, dokumen resmi dari pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan pengelola museum. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai sumber relevan seperti pengelola museum, pensiun TNI-POLRI, tokoh masyarakat dan pengunjung museum. Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menggunakan sumber sumber tertulis seperti buku, artikel, dan arsip relevan.

Kedua yang dilakukan yaitu verifikasi, dimana peneliti menentukan kredibilitas sumber baik dari dalam maupun dari luar. Semua sumber yang dikumpulkan akan diperiksa satu persatu bukti keabsahannya supaya penelitian ini menggunakan sumber yang kuat. Pada sumber primer (Abdurahman, 2007). *Ketiga* yang dilakukan yaitu interpretasi, dimana peneliti melakukan analisis, makna dan penafsiran terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan diuji validitasnya. Penafsiran ini dilakukan dengan pendekatan kritis, menghindari subjektivitas yang berlebihan dan berpegangan pada kerangka teori yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tahap interpretasi menjadi dasar yang kuat untuk menyusun narasi sejarah yang akurat, bermakna dan relevan dengan konteks keilmuan serta perkembangan masyarakat saat ini (Sjamsudin, 2007). *Keempat*, yaitu historiografi, dimana peneliti setelah melakukan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan, diuji, dan dianalisis sebelumnya, peneliti menyusun narasi sejarah yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Heryati, 2017). Dalam penulisan ini, peneliti menyusun sejarah kronologis bagaimana Museum Tridaya Eka Dharma Bukittinggi menjalankan dan mengalami transformasi dalam fungsi serta perannya selama lebih dari lima dekade, sejak tahun 1970 hingga 2025.

PEMBAHASAN

Museum Tridaya Eka Dharma pada Masa Orde Baru (1973-1998)

Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi didirikan pada masa Ketika pemerintah Orde Baru sedang membangun identitas nasional melalui berbagai instrumen kebudayaan, termasuk museum. Peresmian museum pada 16 Agustus 1973 oleh Muhammad Hatta bukan sekadar upaya pelestarian benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan negara dalam melembagakan memori perjuangan nasional. Pemilihan Bukittinggi sebagai lokasi museum didasarkan pada kedudukannya sebagai pusat

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948-1949 serta daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958. Berbagai koleksi yang disimpan seperti persenjataan, radio komunikasi YBJ-6, dokumen perjuangan, serta perlengkapan militer, memperlihatkan keterkaitan langsung museum dengan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Rahma & Suriani, 2022).

Gambar 1. Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma



Sumber: <https://rri.co.id/bukittinggi/wisata/674723/museum-tri-daya-eka-dharma>

Pendirian museum Tidaya Eka Dharma berlangsung pada masa Orde Baru yang menempatkan sejarah sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional. Setelah pergantian kekuasaan tahun 1966, pemerintah berupaya membangun stabilitas politik melalui penyusunan narasi sejarah nasional yang seragam. Sejarah tidak hanya diposisikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pendidikan idiologi yang diarahkan untuk memperkuat legitimasi negara (Jaman et al., 2026). Kebijakan tersebut tercermin dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973 yang menegaskan pentingnya pembinaan jiwa pancasila, nasionalisme, dan semangat pembangunan nasional (Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1973). Dalam hal ini, museum perjuangan dibangun di berbagai daerah sebagai media untuk menanamkan nilai patriotisme, memperkuat identitas nasional, sekaligus menegaskan legitimasi pemerintah Orde Baru sebagai penerus sah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kebijakan pembangunan museum Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari peran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta institusi militer, khususnya ABRI, dalam menentukan arah penyajian sejarah nasional. Museum-museum perjuangan yang dibangun pada periode tersebut umumnya menampilkan narasi yang menempatkan militer sebagai aktor utama dalam mempertahankan keutuhan negara. Penyusunan alur pameran, pemilihan koleksi, hingga penyusunan narasi sejarah lebih banyak diarahkan untuk

memperlihatkan keberhasilan negara dan aparat militer dalam menjaga kedaulatan nasional (Rahma & Suriani, 2023). Dengan demikian, museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi media komunikasi politik yang membentuk persepsi masyarakat mengenai sejarah bangsa. Tujuan museum pada masa itu untuk mendukung legitimasi negara.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat pada Museum Tridaya Eka Dharma. Narasi utama yang dibangun pada periode awal pendiriannya menitikberatkan pada perjuangan militer dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Berbagai koleksi senjata, perlengkapan tempur, radio komunikasi, serta dokumentasi perjuangan disusun untuk memperlihatkan keberhasilan perjuangan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Dalam konteks ini, museum menghadirkan sejarah PDRI sebagai simbol keberhasilan perjuangan nasional yang memperkuat legitimasi negara. Penyajian koleksi tidak hanya menginformasikan fakta sejarah, tetapi juga membangun memori kolektif mengenai pentingnya persatuan nasional (Munandar, 2011).

Narasi mengenai PRRI juga disusun mengikuti perspektif resmi negara pada masa Orde Baru. Dalam historiografi resmi pemerintah, PRRI lebih banyak diposisikan sebagai ancaman terhadap integrasi nasional dibandingkan sebagai konflik politik yang dipengaruhi oleh persoalan hubungan pusat dan daerah. Akibatnya, penyajian sejarah di museum Tridaya Eka Dharma lebih menonjolkan keberhasilan pemerintah pusat dalam mengembalikan stabilitas nasional daripada memberikan ruang terhadap berbagai perspektif sejarah mengenai latar belakang munculnya PRRI. Pola penyajian tersebut mencerminkan karakter historiografi Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan integrasi nasional sebagai landasan utama pembangunan.

Dominannya kekuatan militer dalam penyajian koleksi museum Tridaya Eka Dharma juga menunjukkan besarnya pengaruh institusi pertahanan terhadap pembentukan narasi sejarah. Hal ini terlihat dari pengelola museum tersebut dipegang oleh anggota ABRI. Sebagian besar koleksi awal museum berasal dari persenjataan yang digunakan selama perjuangan PDRI maupun operasi militer pada masa PRRI. Penataan ruang pameran lebih banyak memperlihatkan senjata, perlengkapan militer, foto-foto perjuangan, dan dokumentasi operasi pertahanan. Pemilihan koleksi semacam ini menunjukkan bahwa representasi sejarah yang dibangun lebih berorientasi pada aspek heroisme perjuangan bersenjata dibandingkan dimensi sosial, politik, maupun kehidupan masyarakat sipil selama periode tersebut. Dengan kata lain, sejarah yang disampaikan kepada pengunjung merupakan sejarah yang telah melalui proses seleksi sesuai dengan kepentingan negara pada saat museum didirikan (Padek.co, 2022).

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori *The Birth of the Museum* yang dikemukakan Tony Bennett (1995). Bennett menjelaskan bahwa museum merupakan *cultural technology*, yaitu institusi yang digunakan negara untuk mengatur cara masyarakat

memahami masa lalu melalui proses seleksi, klasifikasi, dan penyajian koleksi (Bennett, 1995). Museum tidak pernah sepenuhnya netral karena setiap koleksi yang dipamerkan merupakan hasil pilihan yang mencerminkan kepentingan sosial maupun politik pada zamannya. Konsep tersebut sangat relevan untuk menjelaskan fungsi awal Museum Tridaya Eka Dharma. Pada masa Orde Baru, museum tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan koleksi perjuangan, tetapi berfungsi sebagai media pembentukan memori nasional yang sesuai dengan narasi resmi pemerintah (Munandar, 2011). Melalui penyajian koleksi persenjataan, dokumentasi perjuangan PDRI, serta representasi konflik PRRI dari sudut pandang negara, museum berperan membangun kesadaran sejarah masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan persatuan nasional dan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian, museum menjalankan fungsi ideologis sebagai ruang reproduksi nilai-nilai nasionalisme yang sejalan dengan kebijakan politik Orde Baru.

Transformasi Fungsi Museum pada Era Reformasi 1999-2010

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam perkembangan permuseuman di Indonesia. Perubahan sistem politik dari pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis membawa konsekuensi terhadap cara negara memandang sejarah, warisan budaya, dan fungsi museum (Murdiastomo et al., 2023). Jika pada masa Orde Baru museum lebih banyak dijadikan instrumen legitimasi politik melalui penyajian narasi sejarah yang bersifat tunggal, maka pada era Reformasi museum mulai diarahkan sebagai institusi publik yang berorientasi pada pendidikan, pelestarian budaya, penelitian, dan pelayanan masyarakat. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa perubahan politik nasional tidak hanya memengaruhi sistem pemerintahan, tetapi juga mengubah paradigma pengelolaan warisan budaya di Indonesia.

Perubahan pandangan antara masa Orde Baru dengan Reformasi juga tercermin pada Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi. Berakhirnya Orde Baru menyebabkan museum tidak lagi diposisikan sebagai media reproduksi narasi resmi negara, melainkan mulai menjalankan fungsi yang lebih luas sebagai ruang edukasi sejarah (Rahma & Suriani, 2023). Meskipun koleksi utama museum masih mempertahankan koleksi perjuangan PDRI dan PRRI, orientasi penyajiannya mulai bergeser dari penekanan pada heroisme negara menuju penyampaian informasi sejarah yang lebih edukatif. Perubahan ini menunjukkan bahwa museum mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki penyajian sejarah secara lebih terbuka, objektif, dan kontekstual.

Gambar 2. Koleksi dokumentasi dan persenjataan Museum Tridaya Eka Dharma



Sumber: Dokumentasi Penulis 2025

Perubahan yang terjadi di Museum Tridaya Eka Dharma pada 1999-2010, dimana museum mulai menunjukkan pergeseran orientasi dari institusi yang berfungsi menyampaikan narasi resmi negara menuju institusi yang lebih menekankan pelayanan publik (Murdiastomo et al., 2023). Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap kegiatan edukasi, penerimaan kunjungan sekolah, penyediaan informasi sejarah bagi masyarakat, serta keterlibatan museum dalam berbagai kegiatan kebudayaan di Kota Bukittinggi. Walaupun perubahan tersebut belum berlangsung secara menyeluruh, periode ini menjadi fase transisi yang menandai berakhirnya pandangan permuseuman yang hanya berorientasi pada kepentingan negara semata (Adisti et al., 2026).

Transformasi fungsi museum Tridaya Eka Dharma juga dipengaruhi oleh perubahan tata Kelola pemerintah melalui kebijakan desentralisasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor kebudayaan, termasuk museum. Akibatnya, pengelolaan Museum Tridaya Eka

Dharma mulai menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan kebijakan pembangunan daerah. Fokus pengelolaan museum tidak lagi terbatas pada pelestarian koleksi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan fungsi pendidikan, memperluas akses masyarakat terhadap informasi sejarah, dan memperkuat identitas budaya daerah terutama Minangkabau.

Gambar 3. Radio komunikasi YBJ-6 dipakai saat PDRI



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

Perubahan pengelolaan museum juga tercermin dalam pendekatan terhadap koleksi. Pada masa Orde Baru, koleksi lebih banyak diperlakukan sebagai simbol legitimasi perjuangan negara. Sebaliknya, pada masa Reformasi koleksi mulai diposisikan sebagai sumber informasi sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian akademik (Jaman et al., 2026). Koleksi seperti radio komunikasi YBJ-6, senjata perjuangan, dokumentasi PDRI, dan berbagai koleksi lainnya tidak lagi hanya dipahami sebagai simbol heroism militer, tetapi juga sebagai sumber belajar sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika perjuangan bangsa kepada generasi muda. Pergeseran makna tersebut memperlihatkan bahwa nilai suatu koleksi tidak hanya menentukan oleh keberadaan fisiknya, tetapi juga oleh cara koleksi tersebut diinterpretasikan dan dikomunikasikan kepada publik.

Perubahan fungsi museum sebagai sumber belajar semakin terlihat melalui meningkatnya kunjungan pelajar dan mahasiswa. Museum mulai dimanfaatkan sebagai laboratorium sejarah yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung melalui pengamatan terhadap benda-benda autentik. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan pendidikan sejarah yang menekankan pembelajaran berbasis

sumber (*source-based learning*), yaitu pembelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami masa lalu melalui analisis terhadap bukti sejarah. Dengan demikian, museum tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pembelajaran di kelas, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran sejarah.

Selain perubahan fungsi edukatif, era Reformasi juga membawa perubahan terhadap narasi sejarah yang disampaikan museum. Jika sebelumnya narasi lebih didominasi oleh interpretasi resmi pemerintah, maka setelah Reformasi mulai muncul ruang untuk menghadirkan perspektif sejarah yang lebih beragam. Perubahan ini tidak berarti menghilangkan narasi nasional, tetapi memberikan kesempatan untuk menempatkan sejarah lokal sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia. Dalam konteks Museum Tridaya Eka Dharma, sejarah PDRI tidak lagi hanya dipahami sebagai simbol legitimasi negara, melainkan juga sebagai bagian dari identitas sejarah masyarakat Sumatera Barat yang memiliki nilai edukatif, kultural, dan akademik.

Meskipun demikian, transformasi pada periode 1999–2010 belum berlangsung secara optimal. Penyajian koleksi masih didominasi oleh metode pameran konvensional dengan penjelasan tekstual yang terbatas, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam interpretasi koleksi masih sangat minim. Kegiatan edukasi juga belum didukung oleh program interpretasi yang sistematis maupun media pembelajaran interaktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa museum masih berada pada tahap awal perubahan menuju paradigma permuseuman modern. Dengan kata lain, periode ini merupakan fase transisi yang memperlihatkan adanya perubahan orientasi kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan transformasi dalam praktik pengelolaan museum.

Museum sebagai Edukasi Publik dan Pariwisata Sejarah 2011-2025

Periode 2011 – 2025 merupakan fase penting dalam transformasi Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi. Jika pada masa Orde Baru museum berfungsi sebagai media legitimasi politik dan era Reformasi mengalami perubahan menuju institutif edukatif, maka pada masa ini, museum mulai diarahkan sebagai ruang pembelajaran publik sekaligus bagian dari pengembangan pariwisata sejarah. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh perubahan pandangan permuseuman di Indonesia yang semakin menekankan fungsi sosial museum sebagai institusi yang melayani masyarakat. Perubahan tersebut diperkuat melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum yang menegaskan bahwa museum memiliki fungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pelestarian budaya, dan rekreasi edukatif (Murdiastomo et al., 2023). Regulasi ini menunjukkan bahwa museum tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tetapi sebagai institusi publik yang harus memberikan manfaat sosial, budaya, dan pendidikan secara berkelanjutan.

Transformasi tersebut juga terlihat pada Museum Tridaya Eka Dharma. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, museum mulai mengembangkan

berbagai kegiatan edukasi melalui penerimaan kunjungan sekolah, mahasiswa, komunitas sejarah, hingga instansi pemerintah. Kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan melihat koleksi, tetapi juga memperoleh penjelasan mengenai sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), perjuangan mempertahankan kemerdekaan, serta dinamika politik di Sumatra Barat. Kehadiran pemandu museum (*museum guide*) menjadi bagian penting dalam proses interpretasi koleksi sehingga pengunjung tidak hanya melihat koleksi sebagai benda bersejarah, tetapi juga memahami konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi keberadaannya. Dengan demikian, fungsi edukatif museum tidak hanya bertumpu pada koleksi fisik, tetapi juga pada proses komunikasi sejarah antara museum dan masyarakat.

Gambar 4. Kunjungan dari sekolah dan Masyarakat ke Museum Tridaya Eka Dharma



Sumber: Instagram melalui akun Tawalib Parabek dan SMPN 8 Payakumbuh

Sebagai sumber belajar, Museum Tridaya Eka Dharma memiliki nilai yang strategis dalam mendukung pembelajaran sejarah berbasis pengalaman (*experiential learning*). Koleksi seperti radio komunikasi YBJ-6, senjata perjuangan, dokumen PDRI, pakaian militer, dan berbagai koleksi lainnya memungkinkan peserta didik menghubungkan materi sejarah yang dipelajari di buku dengan bukti sejarah yang autentik. Pengalaman belajar secara langsung melalui museum memberikan dimensi pembelajaran yang tidak dapat diperoleh hanya melalui buku teks. Museum menjadi ruang yang mengembangkan kemampuan berpikir historis (*historical thinking*) karena peserta didik dapat mengamati, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai sumber dalam satu kesatuan narasi. Oleh karena itu, fungsi museum sebagai laboratorium sejarah semakin penting dalam mendukung pembelajaran sejarah yang kontekstual dan berbasis sumber.

Seiring berkembangnya sektor pariwisata budaya di Indonesia, Museum Tridaya Eka Dharma juga mulai diposisikan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Bukittinggi. Posisi museum yang berada di Kawasan pusat kota serta berdekatan dengan objek wisata lain, seperti Jam Gadang, Benteng *Fort de Kock*, dan Kawasan bersejarah Bukittinggi, memberikan peluang untuk mengembangkan paket wisata terpadu berbasis sejarah dan budaya. Pemerintah daerah mulai memasukan museum sebagai bagian dari promosi destinasi wisata edukatif yang tidak hanya menawarkan nilai rekreasi, tetapi juga pengalaman belajar mengenai sejarah perjuangan bangsa. Dalam konteks ini, museum tidak lagi dipandang sebagai institusi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata budaya yang mendukung pembangunan daerah.

Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjadi faktor penting dalam proses transformasi tersebut. Melalui kebijakan pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan kegiatan budaya, peringatan hari bela negara, serta kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi, pemerintah berupaya meningkatkan fungsi sosial museum. berbagai kegiatan seperti seminar sejarah, kunjungan edukatif, pameran temporer, dan peringatan Hari Museum Indonesia menjadi sarana untuk memperluas keterlibatan masyarakat terhadap museum. dukungan pemerintah juga diwujudkan melalui pemeliharaan bangunan, konservasi koleksi, serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan museum tidak hanya berorientasi pada pelestarian benda, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan sejarah dan pengembangan pariwisata budaya.

Transformasi Museum Tridaya Eka Dharma pada periode ini juga ditandai dengan mulai dimanfaatkannya teknologi digital dalam pengelolaan informasi dan promosi museum. walaupun digitalisasi belum dilakukan secara menyeluruh, museum telah memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Keberadaan museum dalam layanan peta digital, publikasi kegiatan melalui media sosial serta dokumentasi koleksi dalam bentuk digital menjadi Langkah awal menuju pengelolaan museum yang lebih sesuai terhadap perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi sejarah, tetapi juga menjadi strategi yang lebih akrab dengan media digital. Dalam paradigma permuseuman modern, teknologi tidak menggantikan fungsi museum sebagai ruang fisik, tetapi memperluas jangkauan edukasi museum kepada masyarakat yang lebih luas (Sitepu & Atiqah, 2022).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala pada utama adalah keterbatasan anggaran yang memengaruhi pengembangan fasilitas museum, konservasi koleksi, dan penyediaan media interpretasi yang lebih interaktif. Sebagian besar penyajian koleksi masih menggunakan metode konvensional berupa etalase dan label informasi sederhana sehingga belum mampu memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi pengunjung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di

bidang permuseuman, konservasi, dan teknologi digital juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan museum. Kondisi tersebut menyebabkan proses digitalisasi dan inovasi layanan museum berjalan secara bertahap.

Permasalahan lain adalah rendahnya tingkat kunjungan masyarakat di luar kegiatan kunjungan sekolah atau acara tertentu. Museum masih menghadapi tantangan dalam membangun citra sebagai destinasi wisata yang menarik di tengah persaingan dengan objek wisata lain di Kota Bukittinggi. Promosi yang masih terbatas menyebabkan sebagian masyarakat belum mengetahui potensi sejarah yang dimiliki Museum Tridaya Eka Dharma. Oleh karena itu, diperlukan strategi promosi yang lebih inovatif melalui kolaborasi dengan sektor pendidikan, komunitas sejarah, pelaku industri pariwisata, dan media digital agar museum mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, periode 2011–2024 memperlihatkan bahwa Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma telah mengalami transformasi yang signifikan. Fungsi museum tidak lagi terbatas pada pelestarian koleksi atau penyampaian narasi perjuangan, tetapi berkembang menjadi institusi publik yang berperan dalam pendidikan sejarah, pelestarian memori kolektif, dan pengembangan pariwisata budaya (Andini, 2024). Walaupun berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait digitalisasi, promosi, dan keterbatasan sumber daya, arah transformasi tersebut menunjukkan bahwa museum semakin menyesuaikan diri dengan paradigma permuseuman modern yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Dengan demikian, Museum Tridaya Eka Dharma tidak hanya menjadi ruang penyimpanan koleksi sejarah, tetapi juga menjadi media pembelajaran, pelestarian identitas budaya, dan penguatan kesadaran sejarah bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukittinggi mengalami transformasi fungsi dan peran yang signifikan sepanjang periode 1973–2025. Pada masa Orde Baru (1973–1998), museum tidak hanya berfungsi sebagai institusi pelestarian warisan sejarah, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi politik negara melalui penyajian narasi sejarah yang mendukung ideologi pembangunan dan penguatan identitas nasional. Memasuki era Reformasi (1999–2010), Museum Tridaya Eka Dharma mulai mengalami perubahan paradigma seiring berkembangnya konsep permuseuman yang lebih berorientasi pada masyarakat. Museum tidak lagi semata-mata menjadi media reproduksi narasi resmi negara, tetapi berkembang sebagai ruang edukasi sejarah, pelestarian budaya, dan sumber belajar bagi masyarakat. Pada periode 2011–2025, transformasi museum semakin terlihat melalui penguatan fungsi edukasi publik dan pengembangan museum sebagai bagian dari pariwisata sejarah di Kota Bukittinggi. Arah perubahan tersebut didukung oleh kebijakan permuseuman nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, yang menegaskan fungsi museum sebagai institusi perlindungan, pendidikan, penelitian, komunikasi budaya, dan pelayanan

kepada masyarakat. Museum mulai memperluas perannya melalui kegiatan edukatif, pemanfaatan media digital, promosi wisata sejarah, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, belum optimalnya digitalisasi koleksi, terbatasnya sumber daya manusia, serta masih rendahnya intensitas promosi dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (1973). Majelis Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Jakarta, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum (2015).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (1999).

Sumber Buku :

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Ar-Ruzz Media.
- Bennett, T. (1995). *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*. Routledge.
- Greenhill, E. H.-. (2000). *Museums and the Interpretation of Visual Culture*. Routledge.
- Heryati. (2017). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mufidah, I. (2019). *Potret Museum Indonesia*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Munandar, A. A. (2011). *Sejarah Permuseuman di Indonesia*. Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Rahma, & Suriani. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Sejarah*. Get Press Indonesia.
- Sjamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Penerbit Ombak.

Sumber Artikel :

- Adisti, R., Ahmal, A., & Barkara, R. S. (2026). Development of E-Brochure Media Based

- on The Collection of The Tridayaya Eka Dharma Struggle Museum on The Material of The Struggle to Maintain Independence for Class XII Students of SMAN 4 Bukittinggi. *Journal of Education and Learning Research*, 3(2), 56–63. <https://doi.org/10.62208/jelr.3.2.p.56-63>.
- Jaman, N., Temarwut, R., & Amsih, N. (2026). Peran Museum Siwalima dalam Melestarikan Identitas Sejarah dan Budaya Maluku. *Jurnal Paris Langkis*, 6(2), 195–204. <https://doi.org/10.37304/parislangkis.v6i2.23113>.
- Murdihastomo, A., Bismoko, D. S., & Siswantara, R. P. (2023). Tata Pamer Museum Negeri Pada Masa Lalu Dan Masa Kini: Studi Museum Nasional Indonesia dan Museum Sonobudoyo. *PURBAWIDYA*, 12(1), 17–31. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2023.264>
- Rahma, A., & Suriani. (2023). Museum Perjuangan Tridayaya Eka Dharma dan Literasi Sejarah di Bukittinggi 1973-2018. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1(5), 536–551. <https://ecosemica.net/index.php/HUMANITIS/article/view/437>
- Rooseline, & Yudiswara. (2025). Peran Museum Rumah Garuda dalam Meningkatkan Pembelajaran Identitas Nasional. *Journal of Civic Education*, 8(2). <https://doi.org/10.24036/jce.v8i2.1178>
- Sitepu, F. A. B., & Atiqah, A. N. (2022). Pengaruh Penerapan Konsep Digitalisasi di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.47256/kji.v16i1.135>

Wawancara :

Wawancara dengan Dra. Elvi Nazli, Guru Sejarah SMAN 1 Matur, 2 November 2025.

Wawancara dengan Letkol Supriyono, Kodam I Bukit Barisan, 20 Oktober 2025.

Wawancara dengan Riko, siswa SMP pengunjung museum tahun 2008, 4 November 2025

Wawancara dengan bapak Irwan, pengunjung umum sekaligus warga Bukittinggi tahun 2005, 27 Oktober 2025.

Wawancara dengan Serda Sumartadi, Penjaga Museum 2000-2013, 20 Oktober 2025, Bukittinggi

Wawancara dengan Sertu (Purn.) H. Nasrul, Bukittinggi, 15 November 2025

Wawancara dengan Wakabintal Korem 032/Wirabraja, Letkol H. Syahrul, 20 Oktober 2025,
Padang.

Wawancara dengan Letkol H. Supriyono, Kodam I Bukit Barisan pada tanggal 20 Oktober
2025

Sumber Berita :

Andini. (2024). *Museum Tridaya Eka Dharma*. Radio Republik Indonesia (RRI).
<https://rri.co.id/bukittinggi/wisata/674723/museum-tri-daya-eka-dharma>

Padek.co. (2022). Museum Perjuangan Tri Daya Eka Dharma, Jejak Heroik di Bukittinggi.
Padang Ekspres.